

TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN SERTA DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA MASYARAKAT ADAT KAILI KORI

Penyusun :

GIFVENTS S.H
MONASTOR MIKA
YULIA ASTUTI
ANDIKA JHOUNASTYA



TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN SERTA DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA MASYARAKAT ADAT KAILI KORI

Penyusun :

**GIFVENTS S.H
MONASTOR MIKA
YULIA ASTUTI
ANDIKA JHOUNASTYA**

Cover & Tata Letak : **YAYAN SUGANTINA**

Website : <https://komiu.id/>
Email : official@komiu.id
www.facebook.com/komiu.indonesia/

DAFTAR ISI



A. OPSI KEBIJAKAN

- 1** Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala segera mengeluarkan kebijakan untuk melakukan evaluasi program pengurangan gas rumah kaca yang menyoar masyarakat adat dan lokal, untuk berpartisipasi dalam mengurangi kerusakan hutan yang berakibat pada bencana alam dan perubahan iklim.
- 2** Pemerintah Kabupaten Donggala segera membentuk panitia inventarisasi wilayah adat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- 3** Pemerintah Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Tengah segera menyurat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk melakukan penciptaan dan pencabutan izin pertambangan yang terbit di kawasan pemukiman dan wilayah kelola masyarakat adat dan lokal.
- 4** Pemerintah Kabupaten Donggala segera meninjau kembali terkait penerbitan izin PT. Donggala Sawit Hijau yang tumpang tindih dengan kawasan pangan berkelanjutan sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM

Bumi dilaporkan semakin panas akibat perubahan iklim. Hal itu dikemukakan oleh Hoesung Lee ketua panel antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim perserikatan bangsa-bangsa (PBB) atau intergovernmental panel on climate change (IPCC). Panel tersebut mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa perubahan iklim benar-benar disebabkan oleh aktivitas manusia dan telah menyebabkan pemanasan Bumi secara bertahap hingga lebih dari 1,1 derajat Celsius sejak abad ke-19.¹ IPCC memperingatkan bahwa dalam 20 tahun, dunia mungkin akan mencapai atau bahkan melampaui ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius yang akan memicu cairnya gletser, naiknya permukaan laut, serta banjir dan kekeringan yang menghancurkan. Perubahan iklim sudah mempengaruhi setiap wilayah di Bumi.²

Merujuk pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Laporan IPCC ini disusun berdasarkan lebih dari 14.000 studi ilmiah. Perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini mulai menunjukkan efek mematikan bagi manusia dan sudah sangat terlambat bagi kita untuk menghentikannya, yang hanya dapat manusia lakukan saat ini adalah memperlambat dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, agar bagi negara-negara di seluruh dunia memiliki cukup waktu untuk bersiap-siap menghadapi bencana, seperti gelombang panas yang baru-baru ini dialami Yunani dan Amerika Utara bagian barat, dan banjir seperti yang terjadi di Jerman serta China, meskipun memperlambat perubahan, bumi tidak akan selamat.³ Bumi belum pernah sepanas ini sejak Masa Pliosen, sekitar 3 juta tahun silam. Ketika itu, permukaan air laut 25 meter lebih tinggi dari saat ini dan nenek moyang manusia baru muncul di Afrika.⁴

Dampak perubahan iklim juga mengancam seluruh spesies Endemik Wolfgang Kiessling, seorang Pakar Kelautan dari Universitas Friedrich-Alexander Erlangen-Nurmburg di Jerman mengatakan, di wilayah pegunungan, sebanyak 84% hewan dan tumbuhan endemik juga akan menghadapi kepunahan jika perubahan iklim terjadi dan suhu planet memanaskan lebih dari 3 derajat Celsius. Sedangkan, kepunahan akan meningkat jumlahnya hingga 100% di pulau-pulau kecil. Hingga secara keseluruhan, 92% spesies endemik darat dan 95 persen spesies endemik laut menghadapi konsekuensi negatif dengan jumlah yang berangsur-angsur menurun, spesies pendatang akan diuntungkan dalam kasus ini. Sedangkan, spesies yang membentuk keanekaragaman hayati di suatu tempat akan hilang, termasuk Indonesia.⁵

(1) Liputan 6.com "PBB sebut Perubahan Iklim Picu Bumi Panas Lebih Dari 1,1 Derajat Celsius" diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/4628397/pbb-sebut-perubahan-iklim-picu-bumi-panas-lebih-dari-11-derajat-celsius>, 10 Agustus 2021.

(2) Fajar Nugraha. "Laporan Badan PBB: Perubahan Iklim Meluas, Cepat dan Semakin Intens" diakses dari <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/yKXjPJDdb-laporan-badan-pbb-perubahan-iklim-meluas-cepat-dan-semakin-intensif/>, 10 Agustus 2021.

(3) Liberty Jamadu "PBB: Terlambat Sudah, Dunia Sedang Menuju Kehancuran Akibat Perubahan Iklim" diakses dari <https://www.suara.com/teknologi/2021/08/09/172004/pbb-terlambat-sudah-dunia-sedang-menuju-kehancuran-akibat-perubahan-iklim?page=all>, 9 Agustus 2021.

(4) Syarifudin. "Laporan PBB Soal Perubahan Iklim Nyalakan Kode Merah Untuk Kemanusiaan" diakses dari <https://international.sindonews.com/read/506426/42/laporan-pbb-soal-perubahan-iklim-nyalakan-kode-merah-untuk-kemanusiaan-1628525303/10>, 10 Agustus 2021.

(5) Ellyvon Pranitia "Daftar Spesies Endemik Terancam Punah Akibat Perubahan Iklim di Dunia" diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/13/070000823/daftar-spesies-endemik-terancam-punah-akibat-perubahan-iklim-di-dunia?page=all>, 13 April 2021

Selain itu disektor pertanian dan perkebunan di seluruh dunia akan terkena imbasnya secara langsung, hasil panen bisa turun 2% tiap 10 tahun hingga berabad-abad ke depan. Sektor perikanan juga akan terdampak dengan perubahan keseimbangan kadar kimia di samudera. Beberapa ikan di daerah tropis akan langka. Spesies lainnya di belahan bumi Utara segera menyusul, harga makanan bisa melonjak antara 3%-84% pada 2050. Kenaikan panen dibutuhkan untuk memenuhi kenaikan permintaan, tetapi perubahan iklim menurunkan tingkat panen. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menilai Indonesia termasuk paling rawan menjadi korban perubahan iklim.

Mengacu pada data Bank Dunia per 2020, saat ini 30% populasi manusia di bumi bekerja di sektor pertanian. Di Indonesia, sektor pertanian (termasuk di dalamnya perkebunan, perikanan dan kehutanan) juga menjadi mata pencaharian utama, dengan menyerap 38,78 juta jiwa, atau 29,6% penduduk Indonesia yang bekerja. Sektor pertanian merupakan penyumbang devisa utama nasional, berupa ekspor komoditas minyak sawit, karet, kakao, hingga rumput laut. Ekspor minyak dan lemak nabati (termasuk sawit) mencetak kontribusi ekspor terbesar setiap tahunnya, antara 13%-15%, disusul bahan bakar mineral (batu bara dkk) sebesar 10%-11% per tahun. Sektor pertambangan batu bara pun rentan risiko cuaca ekstrim, karena aktivitas penambangan terganggu ketika terjadi curah hujan ekstrim.⁶

Jika dampak perubahan iklim menghantam kedua sektor tersebut secara bersamaan, maka pemasukan devisa mengalami penurunan, mengingat kombinasi sawit dan batu bara menyumbang 20%-25% ekspor nasional. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Jika seperempat pemasukan devisa terganggu karena anjloknya panen dan produksi batu bara, pemerintah bakal menghadapi problem fiskal yang bakal berujung pada kenaikan utang baru, yang pada gilirannya kian membatasi kapasitas fiskal untuk membiayai program sosial-termasuk di dalamnya program pencegahan perubahan iklim.⁷

Dilain pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan dan meminta komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini membutuhkan komitmen politik karena harus dimulai dari kepala daerah yang diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Situasi ini sudah sangat mendesak karena pemerintah daerah harus mempersiapkan kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim. Bencana itu meliputi badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan kekeringan yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat yang akan menimbulkan resiko dan kerugian yang lebih besar. Upaya untuk mengatasi persoalan tersebut cukup menantang karena ini membutuhkan komitmen gotong royong dan koneksitas yang kuat dari level pusat hingga daerah dengan usaha-usaha yang komprehensif dan nyata.⁸

(6) Arif Gunawan, "Awat! Sektor Andalan RI Jadi Korban Utama Perubahan Iklim" diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210801115855-4-265188/awat-sektor-andalan-ri-jadi-korban-utama-perubahan-iklim/1> 01 Agustus 2021

(7) Lidya Julita Sembiring "Sri Mulyanim, Ancaman Seram, dan Dana RP. 3.700 T" diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210805201004-4-266490/sri-mulyani-ancaman-seram-dan-dana-rp-3700-t> . 6 Agustus 2021.

(8) Aditya Budiman "BMKG Minta Kepala Daerah Serius Siapkan Mitigasi Perubahan Iklim" diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1491857/bmkg-minta-kepala-daerah-serius-siapkan-mitigasi-perubahan-iklim> 7 Agustus 2021

Indonesia pada 25 oktober 2016 telah mengesahkan konvensi internasional paris agreemeent to the united nations framework convention on climate change melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Namun pengesahan konvensi internasional tersebut dinilai belum maksimal di implementasikan baik pusat maupun daerah, Pemerintahan daerah belum memberi perhatian untuk mengatasi situasi genting ini, kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hanya ditafsirkan sebagai kegiatan seremoni belaka, bahkan tidak menjadi prioritas dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPMJD), sementara perluasan sektor industri berbasis sumber daya alam sangat masif dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah membuat kegagalan dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sementara terkait pengakuan wilayah kelola masyarakat adat di Indonesia Khususnya di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat sedikit, beberapa diantaranya pengakuan Hutan Adat Wana Posangke di Kabupaten Morowali SK.6747/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 dengan luas 4660 Hektar. Padahal jika merujuk pada pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 bahwa Gubernur dan Walikota/Bupati dapat membuat panitia registrasi masyarakat hukum adat. Dari kondisi ini penting untuk mendorong aksi kolaborasi antara para pihak sehingga mampu mewujudkan pengakuan wilayah kelola masyarakat adat yang dapat berkontribusi melakukan pengurangan resiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi di Sulawesi Tengah.

C. ANALISIS MASALAH

Dari gambaran permasalahan diatas, tim peneliti Yayasan Kompas Peduli Hutan memfokuskan penelitian pada dua aspek diantaranya :

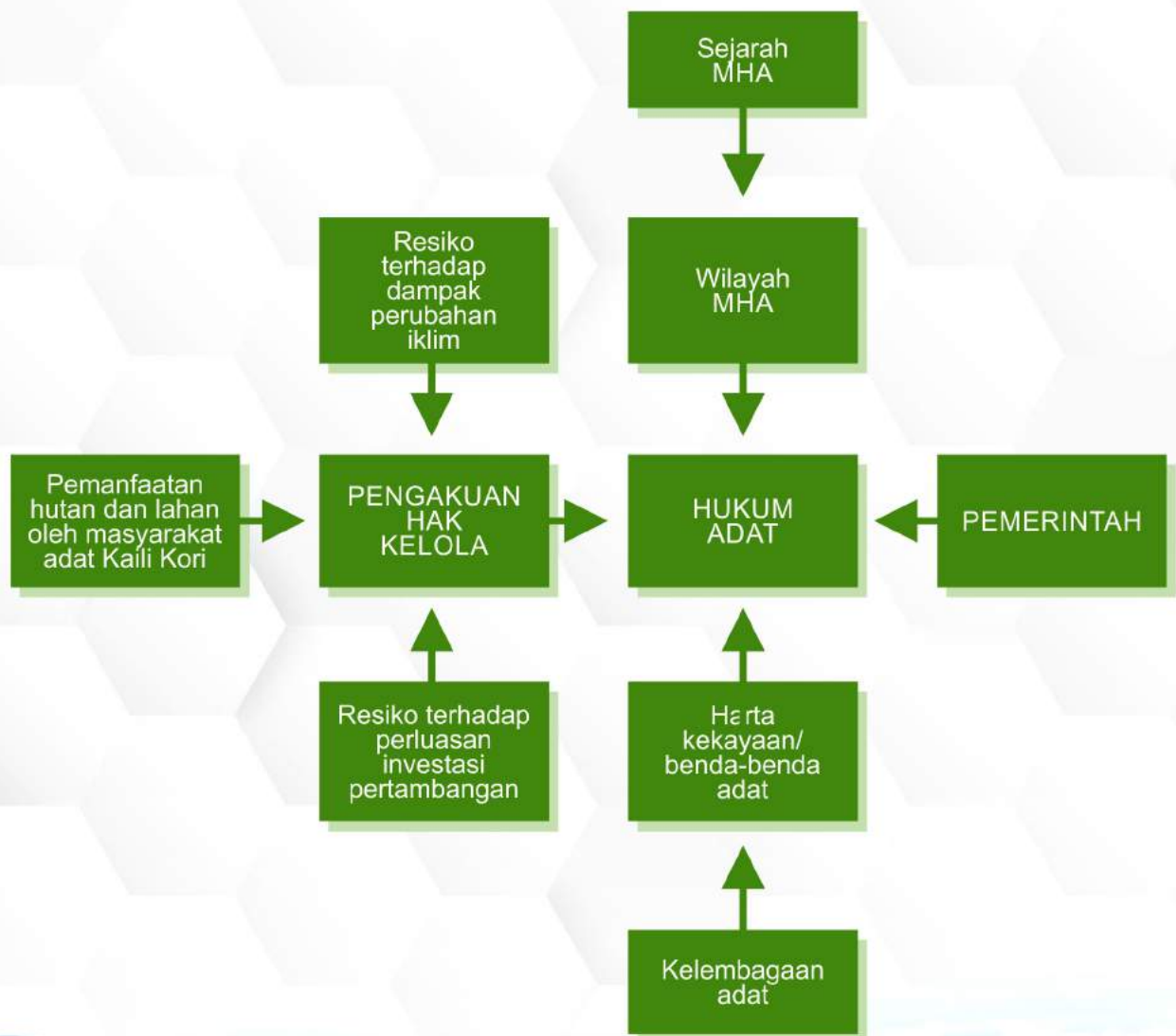
- 1 Bagaimana tata kelola hutan dan lahan oleh masyarakat adat Kaili Kori ?
- 2 Bagaimana perubahan iklim berpengaruh pada pola hidup masyarakat adat Kaili Kori ?

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengambilan data dilakukan melalui Focus Group Discussion bersama masyarakat adat kaili kori yang melibatkan 5 – 7 orang yang terdiri dari kepala suku, perempuan dan anggota masyarakat lainnya, selain itu wawancara juga dilakukan kepada kepala dusun dan kepala Desa Amal, kecamatan sindue Kabupaten Donggala.

Hasil wawancara diuraikan secara analisis deksriptif dengan menjabarkan data-data wawancara yang diperoleh melalui metode sampling snowball dengan menentukan secara sengaja sampel wawancara.

E. KERANGKA PIKIR



F. TATA KELOLA HUTAN DAN MASYARAKAT ADAT KAILI KORI

PEMBAGIAN WILAYAH KELOLA

Masyarakat kaili Rai Kori mengenal pembagian wilayah kelola menjadi beberapa wilayah diantaranya :

Pangale (hutan). Pangale atau kawasan hutan, oleh masyarakat kaili rai kori menjadi tempat untuk mengambil hasil hutan bukan kayu seperti rotan, gula aren dan tumbuhan hutan lainnya yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan ekonomi.

Povia (Kebun). Povia atau kebun, oleh masyarakat kaili rai kori, dijadikan tempat menanam bahan pangan seperti padi ladang, jagung dan durian.

Kinta (perkampungan). Kinta atau perkampungan merupakan wilayah yang dimukim oleh suku kaili kori di wilayah Dusun Ape, wilayah ini menjadi tempat sentral masyarakat dalam berinteraksi. 30 tahun Sebelumnya suku kaili kori, masih hidup berpindah-pindah, rentang waktu berpindah untuk bermukim dan membuka lahan yaitu bersiklus 5 tahun, hingga tahun 2000an mereka lebih sering berpindah hampir setiap 1 tahun, hal ini dipengaruhi oleh berbagai salah satunya adalah semakin menyempitnya wilayah kelola dan kebutuhan akan administrasi kependudukan. Pasca bencana 28 september 2018, saat ini mereka menetap di Dusun Ape Desa Amal, yang rumah mereka dibangun oleh yayasan caritas indonesia.



G. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP MASYARAKAT ADAT KAILI KORI

Perubahan Iklim

Pola Perubahan Musim Lokal di Dusun Ape Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Periode Waktu 2010-2019

Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Hujan		Pancaroba				Kemarau				Hujan	

Pola Perubahan Musim lokal di Dusun Ape Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Periode waktu 2020 - 2021

Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt
Hujan								Pancaroba			

Merujuk data BMKG januari-september 2021 curah hujan di wilayah Kabupaten Donggala tepatnya dileher Sulawesi mencapai 28 hingga 50 mm. Hal ini membuat masyarakat kaili kori tidak dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Musim hujan berpengaruh pada pola tanam jagung, banyak jagung yang rusak akibat serangan hama, masyarakat kaili kori terpaksa menanam jagung meskipun hasilnya tidak maksimal. Musim penghujan juga mempengaruhi tanaman musiman seperti durian dan alpukat yang juga mengalami penurunan produksi akibat bunga tidak berkembang menjadi buah dan berulat. Intensitas hujan yang sering dan curah hujan tinggi membuat wilayah ini beberapa kali diterjang banjir bandang dan mengakibatkan longsor.

Tak hanya itu, pada musim pancaroba ternyata sangat berdampak pada perempuan masyarakat kaili kori dimana mereka harus bekerja ekstra untuk menambal tanaman yang mati akibat perubahan cuaca, terdapat beberapa tanaman pangan seperti padi ladang yang justru tumbuh subur dimusim kemarau namun pada musim pancaroba pertumbuhan padi ladangpun tidak maksimal karena bunga serbuk tidak dapat cahaya matahari yang cukup untuk berfotosintesis.

Ilmu Pengetahuan

Dalam menanam tanaman pangan dan tanaman musiman lainnya, masyarakat kaili kori merujuk pada penanggalan tanggal bulan masehi, bukan tanggal pada bulan hijriyah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tanggal Pada Bulan Berjalan	Posisi Buah Tanaman
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31	Berbuah didalam tanah (umbi)
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29	Berbuah di tengah (jagung)
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30	Berbuah di diatas (kelapa, alpukat, durian)

Selain penanggalan, terdapat juga tanaman obat dan pohon yang selama ini digunakan oleh masyarakat kaili kori untuk mengatasi masalah kesehatan diantaranya :

1 Daun Paratuka (Obat sakit Perut)

Daun Paratuka atau Daun jambu hutan biasanya digunakan oleh masyarakat kaili kori untuk mengobati sakit perut, dengan mengambil beberapa helai daun kemudian direbus dan diminum untuk meredakan sakit perut akibat diare.

2 Daun Pohon Aramaya (Obat luka)

Masyarakat kaili kori menggunakan beberapa helai daun pohon ini untuk mengobati luka menganga, Oleh masyarakat kaili kori daun pohon ini dipilih sebagai obat luka, karena daun pohon ini disukai oleh ular, ketika ular selesai memangsa, tubuh ular mengalami luka, dan daun pohon ini menjadi obat alami pada tubuh ular yang mengalami luka saat melilit mangsanya.

3 Daun Sampulala (obat batuk)

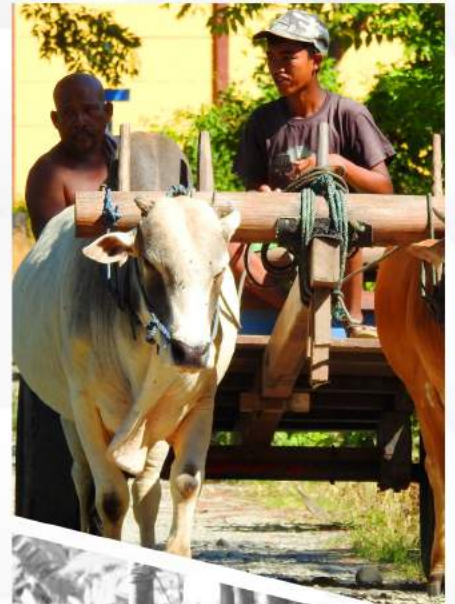
Untuk mengatasi batuk disertai leher gatal, daun ini kemudian dipanaskan diperapian kemudian di tempelken pada leher.

Sistem Mata Pencaharaan

Masyarakat kaili kori adalah petani, mereka mengelola kawasan hutan yang ada di Desa Amal secara turun-temurun. Tidak ada satupun dari mereka yang bekerja diluar desa, Untuk mendapatkan uang, saat ini mereka hanya mengandalkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan.

Terdapat 20 orang laki-laki masyarakat kaili kori yang menjadi perotan, 1 orang dari mereka mampu memanen rotan hingga 100kg per minggu, dengan kisaran harga perkilogramnya Rp. 1200 hingga Rp. 2000. Akibat fluktuasi harga rotan, rotan mereka pernah dibeli oleh pengepul dengan harga terendah Rp. 5000 Per 100 Kg. Penggunaan uang hasil penjualan rotan tersebut dibelanjakan untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya.

Saat ini sistem yang digunakan oleh pengepul untuk mengikat para perotan adalah dengan memberi mereka uang muka Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000 Per Orang. Kadang hasil rotan mereka hanya digunakan untuk menutup utang tersebut. Untuk menutupi itu beberapa dari mereka mendapat peralatan untuk menebang pohon dari oknum-oknum yang ada diluar desa, mereka menebang pohon secara illegal untuk dijadikan bantalan dengan harga perkubiknya mencapai Rp.800.000. Masyarakat kaili kori juga memiliki tanaman musiman seperti durian dan alpukat, namun dengan adanya perubahan musim penghujan hasil panen dari tanaman tersebut juga tidak maksimal.



Tehnologi yang Digunakan oleh Masyarakat Kaili Kori

Dalam berburu masyarakat kaili kori masih mengandalkan jerat dan sumpit sebagai senjata untuk menangkap rusa, namun keberadaan jenis hewan buruan ini semakin berkurang disebabkan alih fungsi lahan yang terus terjadi. Dari segi berkebun masyarakat masih menggunakan alat manual seperti kampak dan parang untuk membuka lahan untuk perkebunan mereka. Sampai dengan saat ini mereka belum pernah mendapatkan bantuan alat pertanian dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten. Sehingga seluruh pekerjaan dalam bertani dilakukan secara manual.

Sistem Kepercayaan

Dalam pengelolaan kawasan hutan masyarakat kaili kori memiliki sistem kepercayaan yang secara turun temurun dipercayai dan diterapkan dalam pengelolaan kawasan hutan di wilayah dusun Ape Desa Amal, diantaranya masyarakat perotan dilarang mengambil anak rotan dan menebang pohon beringin, karena mereka meyakini bahwa hutan akan marah jika pohon beringin ditebang dan anakan rotan diambil secara berlebihan yang dinilai oleh mereka akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat kaili kori.

Selain itu, terdapat sumber mata air yang oleh masyarakat tidak boleh di pergunakan, nama wilayah tersebut dinamai "Salu Lamale" atau jurang udang, di wilayah ini sumber daya udang air tawar sangat melimpah, namun masyarakat kaili kori melarang bahkan tidak ada sama sekali mereka yang memanfaatkan sumber daya udang air tawar tersebut, mereka meyakini bahwa jika mengolah udang tersebut dengan cara membakarnya maka orang yang memakan udang tersebut akan mengalami kematian secara tiba-tiba.

Pada kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat kaili kori, terdapat beberapa sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat diantaranya, Mata Kulambu, Baneaga, dan Lumbulota sementara untuk Salu Lamale terlarang untuk digunakan.



Terkait penanda tentang kejadian alam, masyarakat kaili kori mempercayai beberapa jenis burung endemik sulawesi yang menjadi penanda kabar diantaranya :

- 1 **Cekakak Sungai (Halcyon Chloris).** Burung ini jika berbunyi saling bersahutan dan terbang menyambar atap rumah masyarakat, hal ini dipercayai membawa kabar buruk bagi penghuni rumah.
- 2 **Julang Sulawesi (Rhyticeros cassidix) & Kangkareng Sulawesi (Penelopides exahartus).** Suara julang menandakan bahwa tanaman akan tumbuh subur dan juga buahnya melimpah.
- 3 **Pelatuk Kelabu Sulawesi (Mulleripicus fulvus).** Burung ini adalah penanda akan tibanya musim panen.
- 4 **Gagak Sulawesi (Corvus Typicus) & Bubut Sulawesi (Centropus Celebensis).** Burung ini dipercayai oleh masyarakat kaili kori sebagai burung penanda akan turun hujan.
- 5 **Pergam kepala kelabu (Ducula Radiata).** Burung ini dipercayai oleh masyarakat kaili kori sebagai burung penanda waktu, burung ini akan bersuara sesuai dengan jam pagi, siang, sore dan malam hari.
- 6 **Sikatan Dahi Biru (Cyornis hoevelli).** Masyarakat kaili kori mempercayai bahwa jika burung tersebut bersuara mendekati matahari terbenam atau magrib, maka akan ada kabar duka dari sanak saudara, sehingga burung ini dikenal sebagai burung pembawa berita duka.
- 7 **Tuwur Sulawesi (Eudynamis melanorhyncha).** Burung ini dipercayai oleh masyarakat kaili kori sebagai burung penanda kabar bahwa ada salah satu perempuan yang tinggal di desa hamil diluar nikah.



Cekakak Sungai
(Halcyon chloris)



Julang Sulawesi
(Rhyticeros cassidix)



Pelatuk Kelabu Sulawesi
(Mulleripicus fulvus)



Gagak Sulawesi
(Corvus typicus)



Pergam Kepala kelabu
(Ducula radiata)



Sikatan Dahi Biru
(Cyornis hoevelli)



Tuwur Sulawesi
(Eudynamis melanorhyncha)

Peran Perempuan

Dalam pengelolaan kawasan hutan perempuan kaili kori terlibat dalam setiap proses pengelolaan wilayah kelola, baik itu terlibat dalam membantu membuka lahan, menanam maupun pada saat panen, namun sejak awal tahun 2019 hingga saat ini perempuan harus bekerja ekstra karena banyak tanaman yang mati akibat terpapar hujan setiap hari, sehingga mereka harus menggantinya kembali agar tanaman bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Meskipun demikian hasil panen kualitasnya menurun.

Selain itu, perempuan juga memastikan tanaman obat seperti kunyit, jahe, serei, lengkuas, tersedia dipekarang rumah selain digunakan untuk bahan masakan, tanaman ini juga digunakan sebagai obat-obatan seperti, batuk dan flu.

Secara kelembagaan adat, perempuan juga terlibat memberi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan di rapat dewan adat. Tidak sering keputusan yang dikeluarkan dewan adat selalu memprioritaskan perempuan didalam pengambilan keputusan.

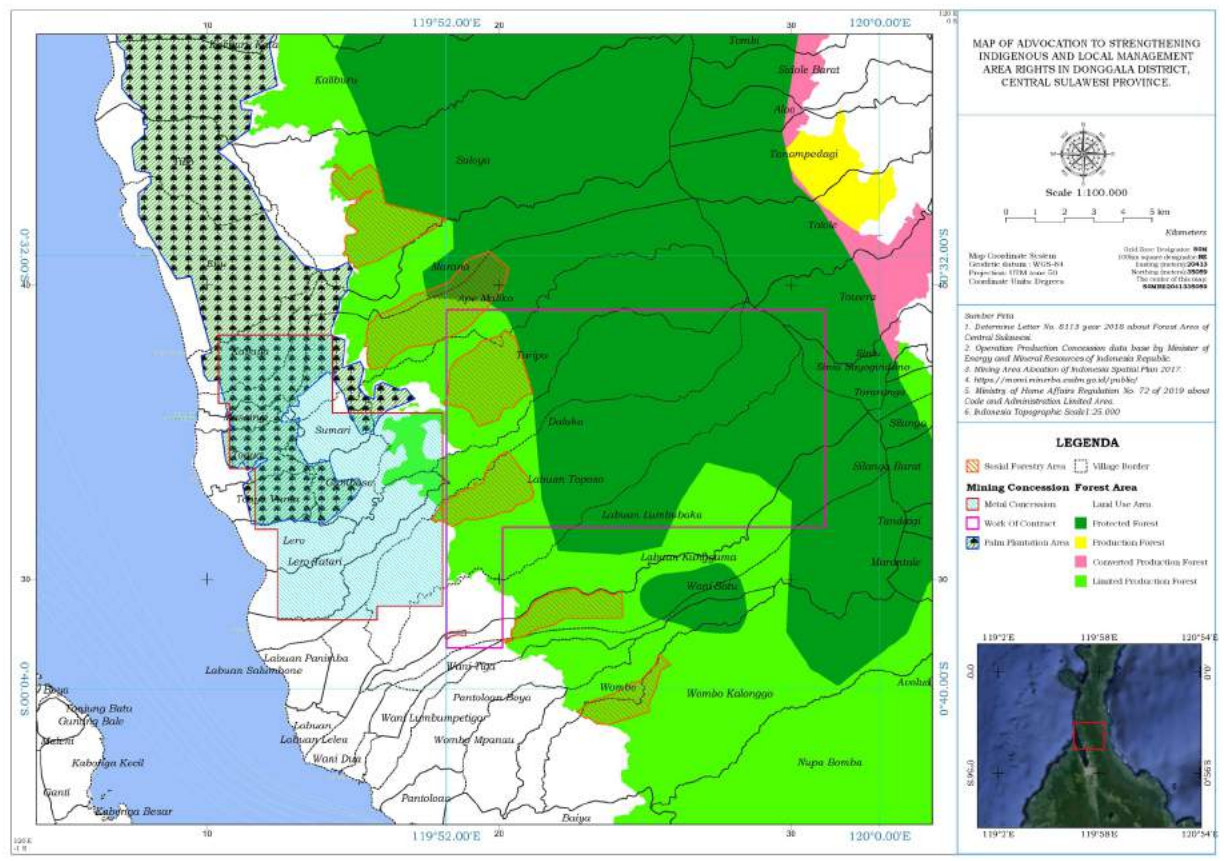


Upacara Adat

Nompaura atau cuci kampung, merupakan upacara adat yang bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur kepada alam semesta yang telah memberikan kehidupan bagi masyarakat khususnya disektor pertanian, upacara adat ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kaili kori. Kegiatan ini ternyata dilakukan secara bersama dengan masyarakat kaili dari sub etnis lain seperti, Kaili Unde dan Kaili Rai.

Upacara ini biasa dibuat pada saat masa panen tiba satu kali dalam satu tahun, namun saat Covid-19 mulai menyebar sampai ketingkat desa, dewan adat menyepakati untuk membuat upacara Nompaura dengan tujuan tolak bala, agar seluruh masyarakat yang ada di Desa tidak terpapar Covid-19.

INVESTASI PERTAMBANGAN DI WILAYAH KELOLA MASYARAKAT ADAT KAILI KORI

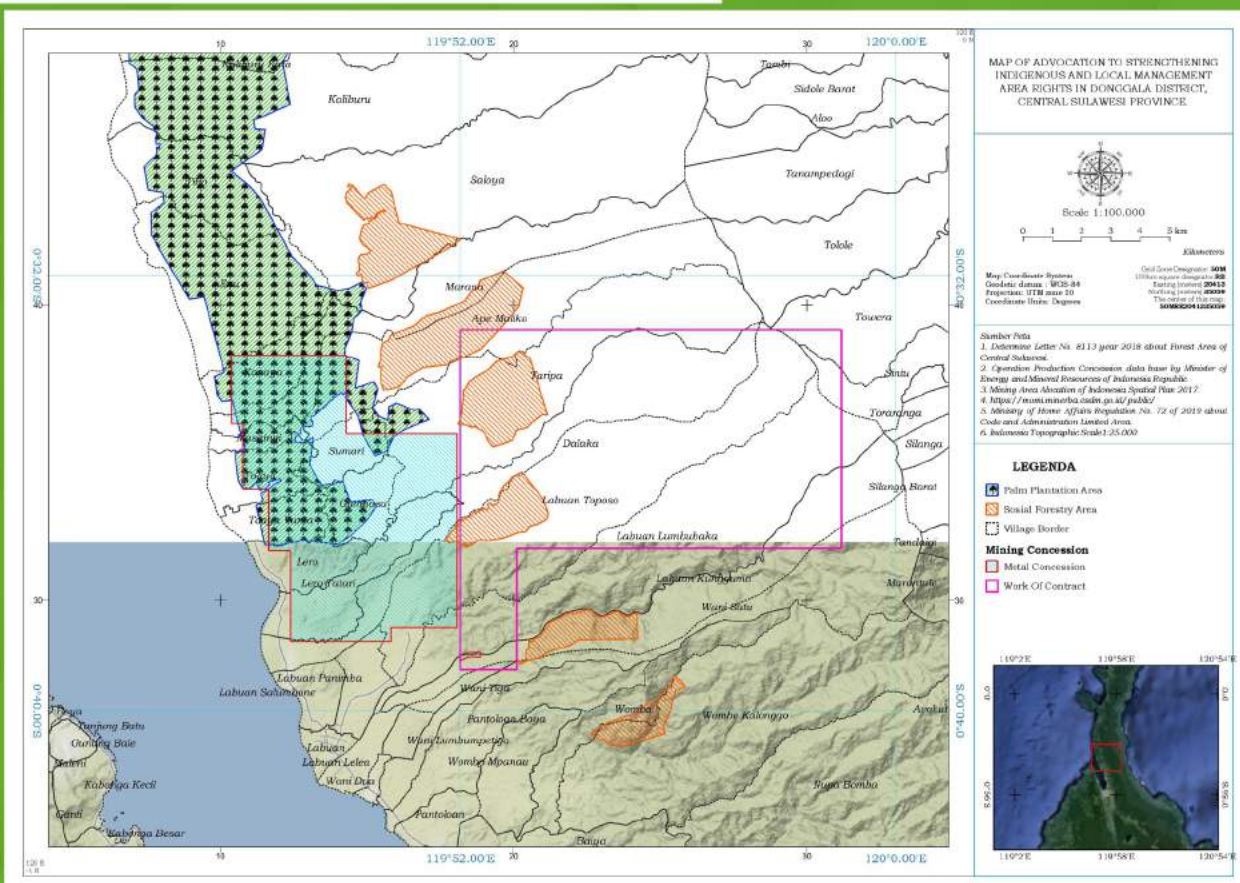


Diketahui bahwa wilayah Desa Amal yang menjadi wilayah kelola masyarakat adat kaili kori ternyata sejak tahun 2017 telah dibebani izin Kontrak Karya PT. Citra Palu Mineral seluas 85.180,00 hektar yang izinnya berakhir pada tahun 2050. Sementara PT. Vio Resources telah mendapatkan izin produksi pada tahun 2020 dan berakhir pada 2040 dan menguasai 5.300 Ha lahan.⁹ Selain pertambangan terdapat izin perkebunan budidaya kelapa sawit milik PT. Donggala Sawit hijau yang menguasai lahan seluas 20.000 Ha.

(9) <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>

PENGAKUAN KELOLA KAWASAN HUTAN

Di lahan yang dikuasai oleh korporasi, wilayah masyarakat kaili kori telah diberikan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Diketahui izin HKM desa amal diberikan kepada Kelompok tani hutan Amal Lestari dengan Nomor : SK.3082/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018, seluas 855 hektar. Dan Izin HKM Desa Labuan Toposo diberikan kepada kelompok tani hutan Topotalua dengan Nomor : SK. 3084/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 seluas 413 Hektar.





Website : <https://komiu.id/>
Email : official@komiu.id
www.facebook.com/komiu.indonesia/